

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan adalah sebuah proses perubahan untuk yang lebih baik dan berkelanjutan yang ingin dicapai Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angka kemiskinan dijadikan sebagai acuan keberhasilan bagi pemerintah untuk mensukseskan pembangunan nasional dari waktu ke waktu, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Sejak awal, masalah kemiskinan bagi negara berkembang khususnya di Indonesia sebenarnya sangat sulit dipisahkan dan merupakan masalah yang sangat rumit karena masalah ini merupakan salah satu faktor penghambat mengapa sulit bagi Indonesia untuk berkembang menjadi negara maju..

Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan harus menjadi perhatian semua kalangan. Dengan kata lain, penanggulangan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat miskin, tetapi juga tanggung jawab mereka yang tidak miskin. Meskipun pengentasan kemiskinan telah digagas sejak lama oleh semua negara, termasuk organisasi dunia, namun belum juga tuntas (Maipita, 2014).

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya memperhatikan kemiskinan dan bekerja keras untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk itu, pemerintah sangat berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan menjadikan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dari rencana pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian dapat tumbuh sehingga lapangan pekerjaan dapat tercipta dan kehidupan yang layak dapat terselenggara bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemakmuran dapat tercapai hingga pada akhirnya mengurangi kemiskinan

Kemiskinan menggambarkan situasi kekurangan materi, kurangnya kebutuhan sosial, dan kurangnya pendapatan yang memadai. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks karena mencakup semua aspek yang saling terkait, termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Karena kemiskinan akan membawa segala macam kesulitan bagi kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Kemiskinan pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain jumlah penduduk, pengangguran dan inflasi (Maipita, 2014:59) Berpendapat bahwa

Kemiskinan memang suatu masalah yang kompleks. Ia tidak terdiri sendiri, banyak faktor yang mempengaruhinya dan menyebabkannya terjadi. Ada faktor internal yang di sebabkan oleh dirinya sendiri, ada juga yang datang dari luar, seperti lingkungan, pemerintah, keadaan perekonomian secara umum, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak, dan banyak hal lainnya. Namun setidaknya kemiskinan muncul karena perbedaan kemampuan, perbedaan sumberdaya, dan perbedaan kesempatan.

Oleh sebab itu, tingginya tingkat kemiskinan di suatu negara dapat menimbulkan banyak dampak, yang dapat menimbulkan kriminalitas,

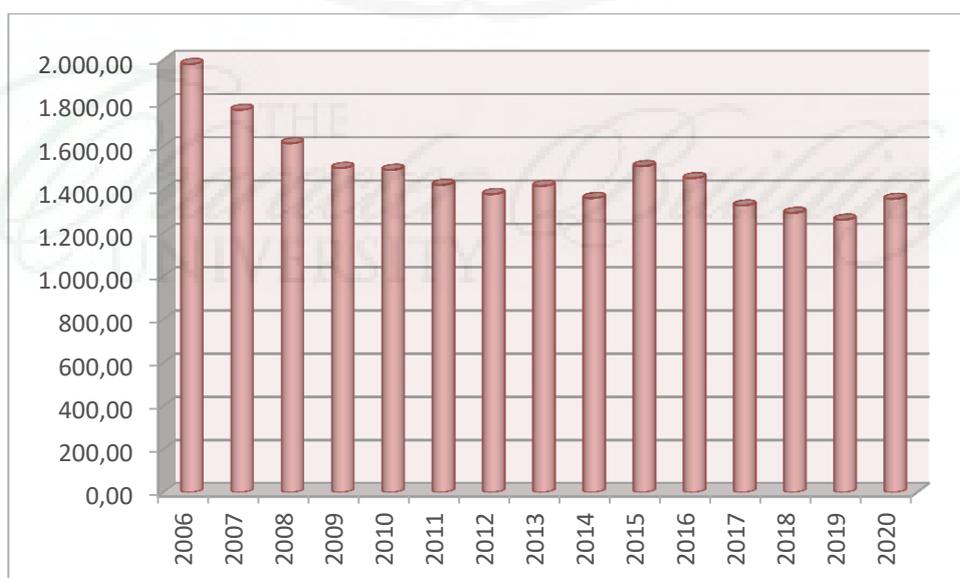
pengangguran, gangguan kesehatan, kekacauan sosial, politik, dan sebagainya. Sesungguhnya upaya pengentasan kemiskinan sudah diawali di Indonesia pada masa Indonesia mencapai kemerdekaan. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai dasar hukum utama dalam bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia) Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2). Pasal 34 berisi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Dan Pasal 27 ayat (2) berisi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Atas dasar pasal-pasal tersebut, kemudian pemerintah melakukan pembuatan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bidang. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan khususnya di Sumatera utara, pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan masyarakat, dan keselamatan untuk mencapai kesejahteraan universal..

Secara umum berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara pada periode Tahun 2006–2020 tingkat kemiskinan di Sumatera Utara terjadi fluktuasi penurunan dan kenaikan. Terdapat Dua (2) fase turun naik yang terjadi, fase pertama dari Tahun 2006 sebanyak 1.979,702 jiwa cenderung menurun hingga Tahun 2014 sebanyak 1.360,600 jiwa, adanya penurunan jumlah penduduk miskin selama periode ini, diduga di pengaruhi oleh dimana nilai tukar petani, upah nominal buruh mengalami peningkatan, menurunnya tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka. Dan kemudian meningkat pada Tahun 2015 menjadi

1.508,140 jiwa, kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Fase Kedua terjadi penurunan pada Tahun 2016 sebanyak 1.452,550 jiwa hingga Tahun 2019 sebanyak 1.260,500 jiwa, lalu mulai meningkat pada Tahun 2020 sebanyak 1.356,720 jiwa. Meningkatnya angka kemiskinan di Sumatera Utara akibat terjadinya pandemi Covid-19, BPS Sumatera Utara menyebut pandemi Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan di Sumatera Utara meningkat menjadi 1.356.7200 pada 2020. Dengan peningkatan tersebut, angka kemiskinan di Sumatera Utara mencapai 9,14%. Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin meningkat yang sebelumnya sebesar 1,260,500 juta atau mencapai 8,63% dari total penduduk Sumatera Utara.

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2006-2020**



SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) SUMATERA UTARA 2021

Menurut (Basir Barthos, (2012:15) “Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah pelaksana pembangunan itu sendiri yaitu para pekerja khususnya dan seluruh penduduk Indonesia pada umumnya”. Maka dengan demikian salah satu akar permasalahan kemiskinan ada kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggi, Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan (Saputra, 2011).

Jumlah penduduk adalah salah satu indikator penting dalam suatu Negara. Ada dua pandangan yang berbeda tentang pengaruh penduduk terhadap pembangunan. Pertama, adalah pandangan pesimis yang berpendapat bahwa penduduk (pertumbuhan penduduk yang cepat) dapat memberikan dan mendorong penipisan sumber daya, kurangnya tabungan, kerusakan lingkungan, kerusakan ekologi, yang kemudian dapat menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kelaparan (Ehrlich, 1981).

Hal ini sesuai dengan pendapat Sukirno (2006: 100) yang mengutip pandangan Nelson dan Leibstein bahwa ada pengaruh langsung antara pertumbuhan penduduk dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Nielsen dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang tidak menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berarti, yang dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan dan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Ahli ekonomi lain yaitu Robert Malthus menanggapi bahwa pada kondisi awal jumlah penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun pada suatu keadaan

optimum pertambahan penduduk tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi malahan dapat menurunkannya, hal ini berbanding lurus dengan apa yang dikatan Maltus dalam teorinya (dalam Todaro dan Smith, 2004: 242) bahwa pertumbuhan penduduk suatu negara yang cepat akan menyebabkan kemiskinan jangka panjang, Malthus kemudian menggambarkan kecenderungan umum bahwa jumlah penduduk di suatu negara akan meningkat sangat cepat menurut deret ukur.

Yang kedua adalah pandangan optimis yang menyatakan bahwa penduduk adalah aset yang memungkinkan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan promosi inovasi teknologi dan kelembagaan (Simon dikutip dalam Thomas, 2001) sehingga dapat mendorong perbaikan kondisi social, dan mendorong tingkat kesejahteraan. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam Smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Sebagai salah satu modal dasar pembangunan, jumlah penduduk yang besar, apalagi disertai dengan kualitas yang baik merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan secara optimal Jumlah penduduk yang besar juga memberi keuntungan lain, yaitu banyaknya konsumen pengguna berbagai barang/produk konsumsi dengan kebutuhan dan latar belakang yang berbeda-beda memaksa produsen melakukan inovasi teknologi baru untuk menghasilkan produk-produksi yang baru juga, ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Basir Barthos, 2012:8) Bahwwa “Pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi timbul pada dasarnya dalam bentuk penduduk sebagai konsumen”. Permintaan yang tinggi terhadap barang/produk konsumsi

menjadi salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan adanya peningkatan yang terjadi, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pendapatan mulai meningkat, jika masyarakat dikategorikan sejahtera maka ia bukan katagori miskin lagi

**Gambar 1.2**  
**Perkembangan Penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2020**



SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) SUMATERA UTARA 2021

Jumlah penduduk di Sumatera Utara yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara terlihat pada Grafik 1.2 Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pertumbuhan penduduk khususnya di Sumatera Utara selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kualitas kesehatan penduduk yang

terlihat dengan ditandai berkurangnya angka kematian, pertumbuhan ekonomi yang mendorong perbaikan gizi masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian tingkat kelahiran, apa lagi dengan adanya ungkapan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Batak yaitu “*Anakku do hamoraon di au*” (anak adalah harta kekayaan ku) dan “*Banyak Anak Banyak Rezeki*”

Keadaan ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang selalu meningkat dengan kondisi tingkat kemiskinan yang cenderung menurun dan meningkat di beberapa tahun tertentu, tidak mutlak menjadi penyebab timbulnya masalah kemiskinan jika sumber daya manusia yang banyak ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai faktor produksi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat diseimbangkan dengan jumlah lapangan kerja.

Permasalahan yang ditimbulkan akibat tingginya jumlah penduduk adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja. Sehingga, terciptalah pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. Menurut Sadono Sukirno, (2010:113) “Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya”. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya.

Sadono Sukirno, (2010:328) Meyatakan bahwa “Di kebanyakan negara masalah utama perekonomian yang di hadapi adalah masalah pengangguran.” Dan Menurut Handy Aribowo Dkk (2019:47) “Pengangguran dan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat erat hubungannya serta menjadi salah satu masalah utama dalam makroekonomi”. Menurut Asfia Murni, (2016:15) “\Secara ekonomi, pengangguran berdampak pada penurunan jumlah produk nasional dan penurunan pendapatan, serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan”.

Hal tersebut di karenakan semakin tinggi tingkat pengangguran suatu daerah maka akan berdampak terhadap kemiskinan di daerah tersebut. Masyarakat yang berada di dalam kondisi pengangguran/tidak bekerja maka masyarakat tersebut akan mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga akan menyebabkan tingkat kemiskinan di dalam kehidupan bermasyarakat akan meningkat, semakin banyak pengangguran, maka semakin banyak masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

Pengangguran merupakan masalah setiap provinsi di Indonesia. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi kelima tertinggi tingkat pengangguran terbukanya di Indonesia. Berikut tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara.

**Gambar 1.3**  
**Perkembangan Pengangguran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2020**



**SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) SUMATERA UTARA 2021**

Berdasarkan Grafik di atas dapat kita lihat bahwa Jumlah pengangguran di Sumatera Utara pada Tahun 2006-2020. Mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunnya, jika dilihat dari tahun 2006-2012 jumlah pengangguran mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 6.320,49 jiwa pada tahun 2006 menjadi 3.799,80 jiwa pada tahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja dapat terserap pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Berdasarkan hasil Survei angkatan kerja nasional (Sakernas) tahun 2012 menunjukkan 43,40 persen penduduk Sumatera Utara bekerja di Sektor Pertanian, 7,68 di sector Industri, sektor lain yang banyak menyerap tenaga kerja adalah Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi sebesar 19,42 persen. Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan menyerap sebanyak 15,56 persen, dan di pengaruhi oleh tingkat pendidikan.

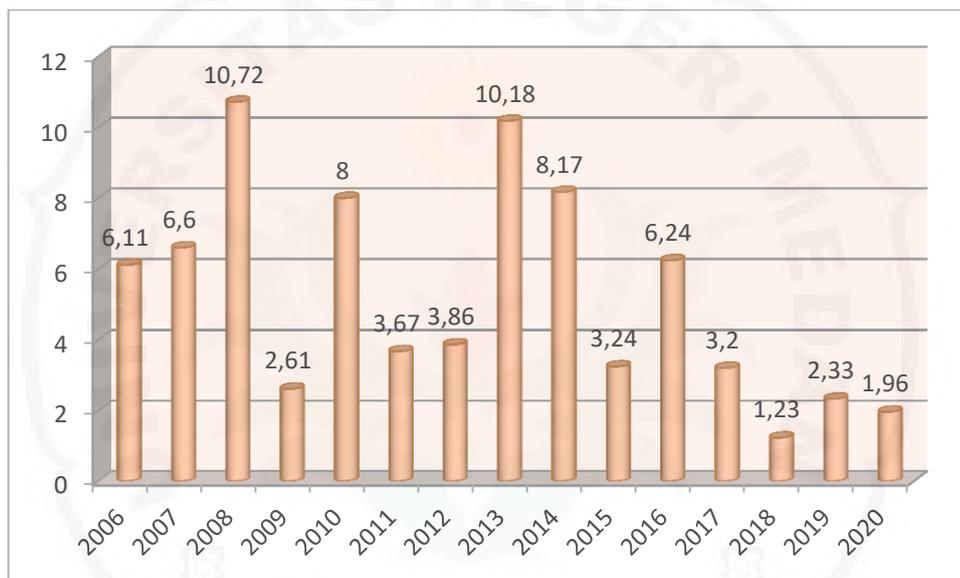
Selanjutnya tingkat pengangguran mengalami naik turun yang di mulai dari tahun 2013 sejumlah 4.122,02 jiwa dan pada tahun 2015 sebanyak 4.287,94 yang mengalami kenaikan, hingga menurun kembali menjadi 3.824,380 jiwa pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 5.078,050 jiwa. Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Sumatera Utara masih tinggi. Pengangguran di Sumatera Utara pada tahun 2020 memang tergolong tinggi akibat pandemi Covid-19 yang tidak hanya akan menciptakan kemiskinan tetapi akan berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk pengangguran.

Kemiskinan juga dapat meningkat dikarenakan adanya dipengaruhi oleh inflasi karena inflasi merupakan salah satu indikator makro yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Inflasi merupakan kondisi naiknya harga barang di pasar secara bersamaan. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dan akan menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan harga yang meningkat apabila lonjakan yang tajam tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat akan menyebabkan pendapatan riil rakyat semakin merosot.

inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan hasil ini didukung dengan adanya teori Sadono Sukirno, (2010:338) bahwa “Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan sahaja menimbulkan beberapa efek buruk kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran idividu dan masyarakat.” Dampak terburuk dari adanya inflasi adalah masyarakat yang biasanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi kurang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya hal tersebut yang akan menyumbang angka kemiskinan di

Sumatera Utara. Angka inflasi sering mengalami kenaikan dan penurunan, dilihat dari data 15 tahun terakhir provinsi Sumatera Utara.

**Gambar 1.4**  
**Perkembangan Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2020**



SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) SUMATERA UTARA 2021

Pada Grafik di atas dapat dilihat bahwa inflasi di Provinsi Sumatra Utara selalu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Inflasi di Provinsi Sumatra masih tergolong ringan karena masih berada dibawah angka 10%, bahkan 2018 mencapai 1,23%, angka tersebut merupakan inflasi terendah dalam 15 tahun terakhir, akan tetapi pada tahun 2008 terjadi peningkatan yang sangat drastis yaitu mencapai 10,72% dimana masyarakat merasakan naiknya harga-harga barang saat itu, Inflasi di Provinsi Sumatera juga mengalami penurunan, namun mengalami peningkatan kembali di tahun 2013 sebesar 10,18% dan juga mengalami kenaikan dan penurunan kembali hingga pada tahun 2020 sebesar 1,96%. Salah satu penyebab tingginya inflasi pada tahun 2008 dan 2013 adalah keputusan

pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mengakibatkan kenaikan inflasi yang tajam.

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa penting untuk memahami dan melihat bagaimana Pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2006-2020. Atas dasar pemikiran inilah yang menggugah perhatian penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2020”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Secara umum bahwa jumlah penduduk miskin Sumatera Utara pada periode Tahun 2006-2020 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2006
2. Jumlah penduduk yang selalu meningkat pada setiap tahunnya menjadi penyebab timbulnya masalah kemiskinan.
3. Jumlah pengangguran di Sumatera Utara tidak stabil, tahun 2004 mengalami kenaikan dan mulai dari tahun 2005 mengalami fluktuasi
4. Pengangguran di Sumatera Utara masih tinggi, Pengangguran yang tinggi yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan.
5. Inflasi di Provinsi Sumatra Utara sangat fluktuatif dari tahun ke tahun

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang ditemukan, serta agar masalah penelitian tidak meluas dan lebih terarah, maka peneliti menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang dipilih adalah Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.
2. Penelitian ini merupakan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan apakah Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah ada pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.
2. Apakah ada pengaruh jumlah Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.
3. Apakah ada pengaruh Tingkat Inflasi terhadap tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.
4. Apakah ada pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Tingkat Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, jumlah pengangguran, dan Tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana peneliti untuk belajar sekaligus menambah waasan serta ilmu pengetahuan dan di samping itu memperoleh gambaran tentang jumlah penduduk, pengangguran, tingkat inflasi, dan kemiskinan dan melihat efek masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini.

### 2. Bagi institusi

Diarapkan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan materi yang berkaitan dengan penelitian ini. Demikian juga Dharma Bhakti terhadap perguruan tinggi khususnya Universitas Negeri Medan.

### 3. Bagi objek penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan Sebagai tambahan rujukan referensi bagi pemerintahan khususnya di provinsi Sumatra utara dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian lebih serta menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

